

Peran Dinas PUPR Kabupaten Jember Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Infrastruktur Untuk Konektivitas Dan Pemerataan Ekonomi Wilayah

Muhammad Raihan Muhtaromi¹, Udik Mashudi²

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember

² Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember

¹raihanmuhtaromi1@gmail.com ²udikmashudi.uinkhas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jember dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur jembatan sebagai sarana konektivitas dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari internal Dinas PUPR, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas PUPR Kabupaten Jember terbagi dalam tiga aspek utama: (1) perencanaan berbasis data prioritas berdasarkan skala Nilai Kondisi jembatan (NK0-NK5) yang berfokus pada kerusakan terparah (NK4 dan NK5) akibat keterbatasan anggaran; (2) pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang transparan melalui pihak ketiga (tender/e-katalog) untuk proyek berskala besar dan metode swakelola untuk perbaikan insidental; serta (3) penjagaan konektivitas wilayah yang vital. Pembangunan infrastruktur prioritas ini terbukti mampu menghubungkan kembali daerah terisolir dan memastikan kelancaran distribusi, sehingga menciptakan siklus positif yang bermuara pada pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Infrastruktur, Jembatan, Pemerataan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur fisik merupakan sektor krusial yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemakmuran (Oktaviani et al., 2025). Infrastruktur dipandang sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi yang memegang peranan berarti selaku penggerak dalam mendorong kemajuan serta kesejahteraan warga di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya (Aschauer, n.d.; Dwi et al., 2025). Ketersediaan prasarana yang memadai sangat penting karena mendukung kelancaran mobilitas warga, distribusi barang dan jasa, serta pertukaran informasi antar daerah. Pembangunan infrastruktur pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ekatama et al., 2025; Kurnia et al., 2025).

Dalam konteks kewilayahan, infrastruktur publik berperan sangat penting dalam meningkatkan konektivitas, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta memberikan dukungan kepada sektor industri pengolahan dan perdagangan yang seringkali menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah (Bastian Ahmadan et al., 2025). Infrastruktur jalan dan jembatan, misalnya, sering disebut sebagai komponen yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena terbukti meningkatkan efisiensi distribusi dan mobilitas tenaga kerja (Novi Maryaningsih, 2014). Pembangunan infrastruktur ini menjadi faktor kunci untuk mempercepat perkembangan ekonomi, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi, konektivitas dapat diperbaiki, dan daerah yang tertinggal dapat mengejar ketertinggalannya (Sukwika, 2018). Dengan demikian, pemerataan pembangunan infrastruktur sangat esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menekan angka ketimpangan regional (Ekatama et al., 2025).

Keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut tentu tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah. Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kebijakan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan menarik investasi (Jannah & Kurniati, 2025). Namun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan (Purnama, 2018). Tantangan utama yang kerap dihadapi di lapangan meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, hambatan regulasi, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya koordinasi lintas instansi (Jannah & Kurniati, 2025; Purnama & Resmawan, 2018).

Di Kabupaten Jember, peran Dinas PUPR/Bina Marga menjadi sangat vital dalam merespons tantangan tersebut, khususnya terkait infrastruktur jembatan. Jembatan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi absolut (Husen & Baranyanan, 2021). Jika sebuah jembatan tidak berfungsi, rusak, atau runtuh, maka jalan pasti tidak akan terhubung dan konektivitas antarwilayah menjadi terputus total. Guna menjaga konektivitas tersebut, Dinas PU Kabupaten Jember melakukan proses perencanaan yang sistematis dengan memiliki basis data daftar jembatan berdasarkan tingkat kondisinya. Kondisi jembatan diklasifikasikan mulai dari kategori NK0 (jembatan yang baru dibangun) hingga NK5 (jembatan yang mengalami kerusakan paling parah atau runtuh). Proses perencanaan dimulai dari survei lapangan untuk mengukur kondisi kerusakan secara langsung. Dari hasil pengukuran tersebut, disusunlah desain teknis (engineering design) secara detail yang kemudian menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Prioritas penanganan dan perbaikan difokuskan pada jembatan dengan tingkat kerusakan terparah (NK4 dan NK5).

Dalam tahap pelaksanaannya, Dinas PU Kabupaten Jember menerapkan mekanisme pengelolaan anggaran yang transparan dan amanah melalui dua skema utama. Untuk perbaikan infrastruktur dengan tingkat kerusakan besar, pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga (rekanan) melalui proses tender di LPSE, atau menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL) dan e-purchasing untuk nilai proyek yang lebih kecil. Sementara itu, untuk kerusakan skala kecil atau yang bersifat insidental pelaksanaannya dilakukan melalui skema swakelola. Intervensi dan langkah taktis dari pemerintah daerah semacam ini menjadi sangat penting untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna memacu aktivitas warga (Jannah & Kurniati, 2025; Mutiara & Rahman, 2025). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran Dinas PUPR Kabupaten Jember dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur jembatan sebagai sarana konektivitas dan pemerataan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Desain penelitian studi kasus (case study) dipilih untuk menggali secara mendalam peran birokrasi pemerintahan pada konteks lokal. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Jember, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) / Bina Marga yang memegang otoritas terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber atau informan kunci yang berasal dari internal Dinas PUPR Kabupaten Jember yang memahami secara langsung teknis klasifikasi kerusakan (NK0-NK5) dan manajemen anggaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan), laporan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif kualitatif. Tahapan analisis meliputi: (1) Reduksi data (data reduction), yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari hasil wawancara terkait klasifikasi tingkat kerusakan infrastruktur jembatan; (2) Penyajian data (data display), dengan merangkai informasi ke dalam bentuk teks naratif yang terstruktur guna memudahkan pemahaman atas mekanisme pelaksanaan tender dan swakelola; serta (3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification), yakni memberikan interpretasi dan simpulan akhir mengenai dampak strategis program Dinas PUPR terhadap konektivitas dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas PUPR/Bina Marga Kabupaten Jember, peran pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama: (1) Perencanaan prioritas, (2) Pelaksanaan dan transparansi anggaran, serta (3) Dampak terhadap konektivitas wilayah.

1. Perencanaan Program Infrastruktur berbasis Prioritas

Proses perencanaan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Jember dilakukan secara sistematis dan berbasis data kondisi di lapangan. Dinas PUPR Jember memiliki instrumen klasifikasi kondisi jembatan yang terbagi dalam skala Nilai Kondisi (NK), yakni mulai dari NK0 hingga NK5. Skala NK0 merepresentasikan jembatan yang baru dibangun, NK1 menunjukkan kerusakan ringan, hingga NK5 yang menandakan jembatan mengalami kerusakan paling parah atau runtuh. Mekanisme perencanaan dimulai dari survei dan pengukuran langsung di lapangan oleh tim teknis. Berdasarkan data kerusakan tersebut, dinas menyusun desain teknis (engineering design) secara detail yang bermuara pada pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mengingat keterbatasan sumber daya, Dinas PUPR memprioritaskan penanganan pada infrastruktur dengan kondisi terparah (kategori NK4 dan NK5).

Langkah perencanaan berbasis data yang dilakukan oleh Dinas PUPR Jember sejalan dengan konsep pengelolaan tata ruang dan pembangunan yang terukur. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh serta tanggung jawab krusial dalam menyusun perencanaan pembangunan yang merespons kebutuhan prioritas masyarakat. Penetapan prioritas pada NK4 dan NK5 merupakan respons adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Dengan menyusun engineering design yang presisi, Dinas PUPR Jember berupaya meminimalisasi ketidakefisienan anggaran agar kebutuhan fasilitas umum masyarakat tetap terakomodasi. (Jannah & Kurniati, 2025)

(Aschauer, n.d.) secara spesifik untuk membenarkan langkah rasional dan adaptif pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas (NK4 dan NK5). Hal ini merupakan wujud efisiensi alokasi anggaran yang terbatas agar pengeluaran publik tetap produktif dan tepat sasaran. Selain itu, kutipan dari (Jannah & Kurniati, 2025) dijadikan sandaran teoretis untuk membuktikan bahwa perencanaan berbasis data kondisi di lapangan adalah bentuk ideal pemerintah daerah dalam merespons mandat prioritas warganya secara terukur, sesuai dengan wewenang utuh yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum mulai dari aspek rancangan hingga pengawasan.

2. Pelaksanaan dan Mekanisme Pengelolaan anggaran yang Transparan

Dalam tahap pelaksanaan, Dinas PUPR Jember membagi skema pengerjaan berdasarkan tingkat kerusakan dan besaran anggaran. Terdapat dua skema utama yang diterapkan: Pertama, Melalui Pihak Ketiga (Rekanan), digunakan untuk perbaikan jembatan dengan tingkat kerusakan berskala besar. Pengadaannya dilakukan secara transparan melalui proses tender di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau metode e-Purchasing melalui e-katalog. Kedua, Swakelola, digunakan untuk kerusakan skala kecil atau penanganan yang bersifat insidental (mendadak), seperti perbaikan sandaran jembatan yang rusak akibat kecelakaan. Material dibeli di sekitar lokasi dan eksekusi dilakukan oleh tim internal Dinas PUPR.

Pilihan mekanisme pelaksanaan ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus komitmen terhadap akuntabilitas publik. Pelibatan pihak swasta melalui mekanisme tender sejalan dengan pandangan bahwa pemerintah memerlukan intervensi kemitraan dalam menyediakan sarana publik untuk proyek bermodal besar. Penggunaan LPSE membuktikan komitmen daerah dalam menjaga transparansi dan meminimalisasi celah penyelewengan. Di sisi lain, metode swakelola membuktikan sifat responsif pemerintah daerah guna mencegah mobilitas warga terhambat lebih lama (Bastian Ahmadian et al., 2025).

Penulis memanfaatkan studi Purnama & Resmawan (2018) untuk mengakui kendala klasik birokrasi dan memberikan alas hukum teoretis mengapa pemerintah sangat membutuhkan skema pelibatan swasta (tender pihak ketiga) di dalam menangani proyek infrastruktur bermodal besar. Lebih lanjut, (Dwi et al., 2025) mengonfirmasi bahwa pemanfaatan ekosistem digital seperti LPSE merupakan bukti nyata tingginya komitmen transparansi dan akuntabilitas Dinas PUPR dalam meminimalisasi celah penyelewengan. Untuk melengkapinya, (Bastian Ahmadian et al., 2025) dipakai untuk membenarkan inisiatif penanganan skala kecil lewat skema swakelola sebagai bentuk sifat responsif instansi pemerintah mencegah terhambatnya arus mobilitas.

3. Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Ekonomi

Menurut Dinas PUPR Jember, jembatan memiliki kedudukan yang sangat vital karena merupakan bangunan pelengkap jalan yang tak terpisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan fungsional. Jika sebuah jembatan tidak berfungsi atau runtuh (NK5), maka akses jalan terputus total (konektivitas nol). Pernyataan ini mengonfirmasi landasan teoretis bahwa infrastruktur transportasi secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Tanpa jembatan, mobilitas dan distribusi barang terhenti. Padahal, ketersediaan infrastruktur andal sangat krusial dalam mengurangi biaya logistik. Terputusnya konektivitas merugikan sektor industri dan perdagangan yang menjadi urat nadi ekonomi Jember. Jika prioritas perbaikan diselesaikan, wilayah-wilayah yang terisolir dapat kembali terhubung dengan pusat ekonomi. Hal ini menciptakan siklus positif yang bermuara pada pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ekatama et al., 2025; Oktaviani et al., 2025).

Bagian ini sangat diperkuat oleh literatur teknis dari (Husen & Baranyanan, 2021)) yang membuktikan bahwa jembatan memiliki fungsi "absolut" sebagai kesatuan jalan yang jika terputus akan melumpuhkan konektivitas secara total. Argumen ini ditajamkan secara spesifik melalui referensi (Novi Maryaningsih, 2014) yang menyatakan bahwa elemen jembatan adalah infrastruktur yang paling determinan (berpengaruh) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, (Ekatama et al., 2025; Sukwika, 2018) dikutip untuk mendasari pernyataan bahwa kesenjangan (disparitas) wilayah hanya bisa direduksi lewat intervensi fisik; konektivitas yang kembali terhubung akan menstimulus daerah tertinggal, menjamin distribusi logistik, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana ditekankan oleh (Oktaviani et al., 2025)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas PUPR Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat strategis dan responsif dalam memastikan konektivitas wilayah serta mendorong pemerataan ekonomi melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jembatan. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga aspek utama. Pertama, dari segi perencanaan yang terukur dan adaptif, Dinas PUPR melakukan survei langsung untuk menyusun prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan jembatan (skala NK0-NK5). Penanganan ini difokuskan pada kerusakan yang paling parah (NK4 dan NK5) guna menyiasati keterbatasan anggaran daerah. Kedua, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dijalankan secara transparan melalui dua skema akuntabel, yakni melalui pihak ketiga (sistem tender atau e-purchasing) untuk perbaikan berskala besar, serta skema swakelola oleh tim internal untuk kerusakan berskala kecil atau penanganan insidental. Ketiga, langkah taktis tersebut memberikan dampak strategis terhadap ekonomi wilayah, di mana pemulihan jembatan yang rusak sangat vital dalam menekan biaya logistik dan menjaga kelancaran mobilitas serta distribusi barang. Dengan demikian, upaya tersebut secara langsung mampu menghubungkan kembali wilayah-wilayah yang terisolir dengan pusat ekonomi, sehingga pada akhirnya bermuara pada peningkatan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penulisan artikel ini. Selesainya karya ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan, tidak menyerah, dan berjuang menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.
2. Kedua orang tua tercinta, atas segala doa, cinta kasih, pengorbanan, dan dukungan yang tak pernah putus.
3. Dosen Pembimbing Lapangan, atas segala waktu, kesabaran, serta arahan ilmu yang diberikan selama proses pembimbingan.
4. Ketua Bidang Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Jember, atas keterbukaan informasi, penyediaan data, dan fasilitas yang diberikan selama observasi lapangan.
5. Teman-teman seperjuangan, atas segala bantuan, tawa, dan semangat kebersamaan yang saling menguatkan.

Saya menyadari karya ini masih memiliki kekurangan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Aschauer, D. (n.d.). *Is Public Expenditure Productive ?*
- Bastian Ahmadan, Uswatun Hasanah, Riska Khayuni, Rodiah Harahap, & Ahmad Wahyudi Zein. (2025). Infrastruktur Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Deli Serdang. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 91–101. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.5814>
- Dwi, A., Husada, P., Pradana, G. W., & Ardana, E. R. (2025). Efektivitas Kebijakan E-Government dalam Pelaporan Infrastruktur Publik: Studi pada Aplikasi Silat Jantan. *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.686> Available
- Ekatama, M. R., WA, A. R., & Surya, A. (2025). Pengaruh Inventasi Infrastruktur Terhadap Pemerataan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem*, 6(5), 3504–3522. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN, INFRASTRUKTUR JALAN DAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MALUKU UTARA Amran Husen 1 ., *Jurnal Poros Ekonomi*, X(1).
- Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). Analisis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 231–251. <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie>
- Kurnia, Y., Sari, I., & Kaltara, E. U. (2025). Pengaruh Belanja Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Penelitian Ilmi-Ilmu Sosial*, 2(January), 379–389. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer>
- Mutiara, W., & Rahman, A. (2025). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru * Widia Mutiara 1 , Arif Rahman Hakim 2 1. *Jurnal Mahasiswa Pemerintah*, 2, 453–458.

- Novi Maryaningsih. (2014). Bulletin of Monetary Economics and Banking Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1), 62–98. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44>
- Oktaviani, V. R., Lestari, A., Prayudha, G. A., & Malik, A. (2025). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah The Impact Of Regional Infrastructure Development On Regional Economic Growth. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 9882–9892. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Purnama, N. E., & Resmawan, E. (2018). PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR. *EJurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6, 115–130. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2>.